TATA CARA TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA *STANDING FACILITIES* SYARIAH (Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia No. 17/42/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara transaksi *repurchase agreement* (*Repo*) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang Rupiah.
5. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
6. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendah-

raan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.
8. *Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.
9. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
10. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
11. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

12. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah yang selanjutnya disebut *Repo* SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *Standing Facilities* Syariah.
13. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
14. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia dan/atau transaksi pasar keuangan.
15. Marjin *Repo* SBSN adalah tingkat keuntungan (*profit rate*) dalam setahun (*per annum*) yang disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi *Repo* SBSN.
16. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
17. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan.
18. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.

II. KARAKTERISTIK *REPO* SBSN

1. *Repo* SBSN merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. *Repo* SBSN disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
3. *Repo* SBSN dilakukan dengan mekanisme non lelang.
4. Pengajuan *Repo* SBSN dilakukan melalui

Sistem BI-ETP.

5. Jangka waktu *Repo* SBSN adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*).
6. Jumlah hari dalam perhitungan Marjin *Repo* SBSN dihitung berdasarkan hari kalender.
7. *Window time Repo* SBSN adalah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia membuka *window time Repo* SBSN dengan mengumumkannya melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
9. Dalam hal terdapat perubahan *window time*, seri dan jenis SBSN, *haircut*, dan/atau Marjin *Repo* SBSN, pengumuman dilakukan sebelum *window time Repo* SBSN.
10. Bank Indonesia menetapkan Marjin *Repo* SBSN.
11. Bank mengajukan *Repo* SBSN kepada Bank Indonesia.
12. Persyaratan Bank yang dapat mengikuti *Repo* SBSN adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
13. SBSN milik Bank yang dapat di-*Repo*-kan adalah:
 - a. SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek;
 - b. tercatat di BI-SSSS;
 - c. tidak sedang diagunkan; dan
 - d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat *second leg Repo* SBSN.
14. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan *Repo* SBSN yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
15. Bank dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
16. Bank yang melakukan *Repo* SBSN wajib:
 - a. memiliki jenis dan seri SBSN yang mencu-

kupi dalam Rekening Surat Berharga untuk setelmen penjualan SBSN secara *Repo* paling lambat pada saat dilakukan setelmen *Repo* SBSN (*first leg*); dan

- b. memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen pembelian kembali SBSN pada tanggal *Repo* SBSN jatuh waktu (*second leg*).

17. Dalam hal setelah terjadinya *Repo* SBSN, tanggal jatuh waktu *Repo* SBSN ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan Marjin *Repo* SBSN atas tambahan jangka waktu *Repo* SBSN.

18. Dalam hal *Repo* SBSN dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu *Repo* SBSN ditetapkan pada hari kerja berikutnya.

19. Bank Indonesia menatausahakan *Repo* SBSN pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

20. Harga SBSN yang dapat di-*Repo*-kan ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.

21. Bank Indonesia menetapkan besarnya *haircut* untuk jenis SBSN dalam rangka penentuan nilai setelmen penjualan SBSN.

22. *Haircut* adalah faktor pengurang harga SBSN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

23. Bank Indonesia dapat melakukan perubahan *Haircut* dan mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lainnya.

III. PERSYARATAN UMUM

1. *Repo* SBSN dilakukan dengan menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan janji (*al wa'd*) oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
2. Janji (*wa'd*) Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam rangka *Repo* SBSN dilakukan dalam dokumen yang terpisah. Contoh Dokumen Janji sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan ba-

gian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Bank mengajukan *Repo* SBSN setelah menandatangani dokumen Janji (*wa'd*) Untuk Membeli Kembali SBSN Dalam Rangka *Repo* SBSN Dengan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Dokumen Janji, yang telah dibubuhi meterai cukup dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.

4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi:

a. Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:

- 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh direksi;

- 2) fotokopi anggaran dasar Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh direksi; atau

- 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh direksi;

- 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani perjanjian jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh direksi; dan

- 5) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani Dokumen Janji.

b. Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:

- 1) fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusatnya yang memuat kewenangan pejabat untuk

- mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh *Chief Executive Officer (CEO)*;
- 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh CEO;
 - 3) dalam hal penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh CEO maka surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus memuat hak CEO untuk mengalihkan kewenangannya (hak substitusi); dan
 - 4) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani Dokumen Janji.
5. Penandatanganan Dokumen Janji sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan pada saat Bank pertama kali mengajukan *Repo* SBSN dengan Bank Indonesia.
 6. Khusus untuk UUS, Dokumen Janji sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat ditandatangani oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi Bank konvensional dari UUS.
 7. Dokumen Janji sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi Dokumen Janji dan/atau perubahan Anggaran Dasar Bank atau peraturan daerah mengenai kewenangan direksi Bank untuk mewakili Bank atau ketentuan internal Bank yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.
 8. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 disampaikan dengan surat pengantar kepada:

Direktur Eksekutif
Departemen Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jl. M.H Thamrin No. 2
Jakarta 10350

IV. PENGUMUMAN DAN PENGAJUAN *REPO* SBSN

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi *Repo* SBSN melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya paling lambat sebelum *window time*.
2. Pengumuman *Repo* SBSN mencakup antara lain:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. jenis dan seri SBSN yang dapat di-*Repo*-kan;
 - d. Marjin *Repo* SBSN;
 - e. jangka waktu *Repo* SBSN;
 - f. *haircut*; dan/atau
 - g. tanggal dan waktu setelmen.
3. Bank mengajukan *Repo* SBSN kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam *window time* yang ditetapkan.
4. Pengajuan *Repo* SBSN meliputi antara lain nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-*Repo*-kan.

V. PENGUMUMAN HASIL TRANSAKSI

Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Repo* SBSN setelah *window time* ditutup dengan cara sebagai berikut:

1. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan Marjin *Repo* SBSN; dan
2. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan Marjin *Repo* SBSN.

VI. SETELMEN TRANSAKSI

1. Setelmen Penjualan SBSN (*First Leg*)
 - a. Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* pada hari transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cutoff* Sistem BI-RTGS.
 - b. Setelmen *first leg* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (*gross to gross*) sebagai berikut:
 - 1) Nilai setelmen *first leg* dihitung sebagai berikut:
 - a) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai Setelmen First Leg} = \left[\left(\begin{array}{c} \text{Nominal} \\ \text{SBSN Yang} \\ \text{Di-Repo-Kan} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{Harga} \\ \text{SBSN} \\ \text{-Haircut} \end{array} \right) + \begin{array}{c} \text{Accrued} \\ \text{SBSN} \end{array} \right]$$

b) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

$$\begin{matrix} \text{Nilai} \\ \text{Setelmen} \\ \text{First Leg} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Nominal} \\ \text{SBSN Yang} \\ \text{Di-Repo-Kan} \end{matrix} \times \left(\begin{matrix} \text{Harga} \\ \text{SBSN} \end{matrix} - \text{Haircut} \right)$$

Keterangan:

Harga SBSN : Harga SBSN sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP dan BI-SSSS pada tanggal transaksi *Repo* SBSN

Haircut : *Haircut* sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP dan BI-SSSS.

Accrued Imbalan - Hak atas imbalan SBSN yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *first leg*.

- Perhitungan hak atas imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (*actual per actual*).

- 2) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal dari SBSN yang di-Repo-kan.
- 3) Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- 4) Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *first leg* maka BISSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Repo* SBSN.
- 5) Atas batalnya transaksi *Repo* SBSN sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

tentang Operasi Moneter Syariah.

6) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi *Repo* SBSN dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen *first leg* dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

2. Setelmen Pembelian Kembali SBSN (*Second Leg*)

a. Pada tanggal *Repo* SBSN jatuh waktu (*second leg*) BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen *second leg* sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut off warning* Sistem BI-RTGS.

b. Nilai atas setelmen *second leg* dihitung sebesar:

$$\begin{matrix} \text{Nilai} \\ \text{Setelmen} \\ \text{Second Leg} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Nilai} \\ \text{Setelmen} \\ \text{First Leg} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{Nilai Marjin} \\ \text{Repo SBSN} \end{matrix}$$

Keterangan:

Nilai Marjin *Repo* SBSN adalah penerimaan Bank Indonesia sesuai jangka waktu *Repo* SBSN.

- c. Setelmen Dana, dengan mendebet Rekening Giro sebesar nilai setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang di-Repo-kan.
- e. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro Rupiah dalam jumlah yang cukup sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen *second leg*.
- f. Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pada saat *second leg* Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar kewajiban pembayaran Marjin *Repo* SBSN.
- g. Atas batalnya transaksi *Repo* SBSN jatuh waktu (*second leg*) sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.

h. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi *Repo* SBSN dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat Nilai lebih dari 1 (satu) kali pembatalan *Repo* SBSN jatuh waktu (*second leg*) dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

3. Kegagalan Setelmen *Second Leg*

a. Dalam hal Bank gagal melakukan setelmen *second leg* maka *Repo* SBSN diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara *outright* oleh Bank dengan perhitungan setelmen transaksi penjualan secara *outright* dan penggunaan harga surat berharga transaksi penjualan secara *outright* sebagai berikut:

1) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

$$\text{Nilai Setelmen Penjualan SBSN} = \left(\begin{matrix} \text{Nominal} \\ \text{SBSN} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Harga} \\ \text{SBSN} \end{matrix} \right)$$

2) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai Setelmen Penjualan SBSN} = \left[\begin{matrix} \text{Nominal} \\ \text{SBSN} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Harga} \\ \text{SBSN} \end{matrix} \right] + \text{Accrued Imbalan}$$

VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan setelmen *Repo* SBSN sebagaimana dimaksud pada butir VI.1.b.4) dan butir VI.2.e, Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi *Repo* SBSN yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS

- selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
2. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir VI.2.e dan dalam hal harga SBSN pada saat *second leg* lebih rendah dari harga SBSN pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada transaksi *second leg* setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-*Repo*-kan.
3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan setelmen *Repo* SBSN.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/28/DPM tanggal 27 September 2012 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd,
DODDY ZULVERDI

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER

(BN)